

Indikator Sekolah Responsif Gender



PENGARUSUTAMAAN GENDER
BUKU 5



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat
Tahun 2014

Indikator Sekolah Responsif Gender



PENGARUSUTAMAAN GENDER
BUKU 5



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat
Tahun 2014



Kata Sambutan

Pendidikan nasional sangat berperan bagi pembangunan manusia karena dapat menginvestasikan perwujudan manusia Indonesia yang berakhlak mulia, berkarakter produktif, dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pendidikan sebagai hak azasi manusia tercantum pada pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang tertulis: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pada Pasal 28C ayat (1) tertulis, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Pengintegrasian gender dalam bidang pendidikan juga dilakukan secara sinergi dan koordinatif dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya terutama dalam hal perencanaan dan penganggaran pendidikan responsif gender, audit gender, pengembangan pedoman, dan acuan teknis kegiatan yang disusun bersama-sama dengan pakar, para mitra, pokja kabupaten, kota dan provinsi. Sinergi dan koordinasi ini diharapkan akan menghasilkan peningkatan kapasitas pengarusutamaan gender bidang pendidikan secara lebih memadai.

Sampai pada tahun 2012, capaian kinerja layanan kabupaten/kota telah menerapkan pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan sebesar 57,34% lebih tinggi dari target Renstra Pembangunan Pendidikan Nasional 2010-2014 sebesar 54% dan angka disparitas gender penduduk tuna aksara sebesar 2,4% dari jumlah tuna aksara sebanyak 6.040.522 orang.



Kata Pengantar

Penyusunan dan penerbitan sepuluh judul Buku PUG Bidang Pendidikan tahun 2012 merupakan komitmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam merealisasikan amanat Inpres No. 9 Tahun 2000 dan Permendiknas Nomor 84 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Bidang Pendidikan sebagai wujud peningkatan kapasitas PUG bidang Pendidikan. Sebagai realisasi amanat Inpres tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memenuhi target Renstra Kemdikbud tahun 2012 yaitu tercapainya 54% Kabupaten/Kota melaksanakan PUG bidang Pendidikan. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan buku-buku tersebut. Akhirnya semoga Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT berkenan memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Amin.

Jakarta, November 2014
Direktur Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,

Hamid Muhhamad, Ph.D

Buku “Data dan Indikator Pendidikan Berwawasan Gender Tahun 2012/2013” ini merupakan terbitan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat bekerjasama dengan Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Publikasi ini disusun untuk memberikan gambaran tentang keadaan pendidikan yang berwawasan gender pada kurun waktu 2012/2013. Penyusunan buku ini dilakukan dengan mengacu pada konsep *Gender-Sensitive Education Statistics and Indicators* yang disiapkan oleh UNESCO.

Data dan informasi yang disajikan dalam buku ini memuat beberapa isu utama tentang perbedaan gender dan indeks paritas gender dilihat dari jalur pendidikan sekolah yaitu Statistik TK sampai PT di tingkat nasional. Di samping itu, disajikan pula perbedaan gender dan indeks paritas gender berdasarkan indikator pemerataan, indikator mutu dan indikator efisiensi internal pendidikan. Perbedaan gender dan indeks paritas gender juga diketengahkan dalam setiap bahasan baik dalam statistik berwawasan gender, indikator pendidikan berwawasan gender maupun perkembangan statistik dan indikator pendidikan berwawasan gender.



Daftar Isi

Data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan buku ini bersumber pada hasil pengolahan data pendidikan sekolah dari TK sampai PT yang dilaksanakan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan, sedangkan data penunjang seperti penduduk usia sekolah mengacu pada data dari Badan Pusat Statistik.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku ini diucapkan terima kasih. Saran dan masukan sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan publikasi yang akan datang.

Jakarta, November 2014

Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat,

Dr. Wartanto

NIP 19631009189031001

	Halaman
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Hasil	3
C. Sasaran	4
BAB II INDIKATOR SEKOLAH RESPONSIF GENDER	5
A. Pengertian	5
B. Isu-isu Gender	7
C. Indikator Sekolah Responsif Gender	10
BAB III PELAKSANAAN SEKOLAH RESPONSIF GENDERR.....	22
A. Penguatan Kelembagaan SRG	22
B. Langkah-Langkah Pelaksanaan SRG[.....	25
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	29
A. Pengertian dan Tujuan	29
B. Fungsi Monitoring dan Evaluasi	29
C. Prinsip-prinsip Monitoring dan Evaluasi SRG	30
D. Bentuk Kegiatan, Pelaksana, dan Jadwal Monitoring dan Evaluasi SRG	30
E. Alur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi SRG	31
F. Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data dalam Monitoring dan Evaluasi SRG	31
G. Pelaporan Monitoring dan Evaluasi SRG	33
BAB IV PENUTUP	35

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sekolah merupakan institusi utama bagi negara untuk menyiapkan generasi masa depan yang berkualitas. Sekolah memberikan kesempatan pada setiap pribadi untuk memperoleh pendidikan guna mengembangkan kompetensi pengetahuan, sikap, keterampilan, serta kreativitasnya. Pendidikan di sekolah menjadi proses terpenting yang harus dilewati dengan benar sehingga seseorang menjadi manusia dewasa dengan kompetensi intelektual, mental-spiritual, sosial, dan kecakapan hidup. Kedewasaan yang dicapai melalui pendidikan memberikan peluang agar setiap pribadi menjadi mandiri dan dapat memberikan sumbangan berharga bagi kehidupan secara lebih bermakna.

Pendidikan merupakan sarana strategis dalam menyiapkan generasi bangsa yang memiliki kualitas tinggi agar menjadi sumberdaya manusia yang handal dan kompetitif. Pendidikan memberikan kesempatan kepada peserta didik melakukan eksplorasi terhadap dunia dan mengelolanya agar menjadi lebih produktif; memiliki pemahaman tentang kehidupan sosial, ketekunan mengembangkan diri, sopan santun, menjadi lebih bermartabat; dan memberikan sumbangan untuk terbentuknya generasi masa depan yang memiliki kualitas yang tinggi. Setiap peserta didik, baik perempuan maupun laki-laki mendapatkan kesempatan yang adil dan setara dengan harapan tidak ada pihak yang dirugikan dan tertinggal.

Salah satu upaya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yakni dengan melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di bidang pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 84 Tahun 2008 tentang PUG dalam Bidang Pendidikan mengamanatkan agar setiap satuan unit kerja bidang pendidikan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program pembangunan bidang pendidikan agar mengintegrasikan gender di dalamnya. Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pendidikan dipandang sebagai upaya strategis untuk mengenalkan, memahamkan, menyadarkan, mendorong, dan mewujudkan relasi gender yang berkeadilan dan berkesetaraan dalam situasi yang serasi dan harmonis.

Implementasi keadilan dan kesetaraan gender di sekolah sangat perlu ditingkatkan agar memberikan layanan dan penjaminan bahwa semua warga negara (baik perempuan maupun laki-laki) memiliki kesempatan dalam mengakses pelayanan pendidikan, berpartisipasi aktif, dan mempunyai kontrol serta mendapat manfaat dari pembangunan pendidikan sehingga mereka dapat mengembangkan potensinya secara maksimal. Implementasi tersebut dilakukan dengan kebijakan pengembangan sekolah responsif gender untuk mewujudkan prestasi akademik, pertumbuhan serta perkembangan sikap, dan penguasaan keterampilan dengan didukung atmosfer psikologi-sosial, lingkungan fisik, maupun lingkungan budaya masyarakat dengan berdasarkan kebutuhan spesifik anak laki-laki maupun perempuan secara seimbang.



Pengembangan sekolah responsif gender diharapkan mampu menjadi laboratorium budaya yang mempunyai peran untuk menyiapkan insan Indonesia cerdas dan mulia secara komprehensif melalui pola-pola relasi sosial yang saling mendukung dan menguntungkan bagi perempuan dan laki-laki. Hal tersebut mendukung misi ke-4 Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014, yaitu mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan. Untuk itu, pengembangan

sekolah responsif gender diharapkan mampu meningkatkan kualitas sekolah secara berencana dan berkala dengan tetap bertumpu pada 8 (delapan) standar pendidikan nasional, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan pengelolaan berbasis sekolah.

Program pembangunan sekolah responsif gender dilakukan berdasarkan sejumlah ketentuan berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2006;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan;

B. Tujuan dan Hasil

1. Tujuan

Tujuan pengembangan sekolah responsif gender ialah agar lembaga pendidikan lebih menjamin persamaan peran dan tanggungjawab perempuan serta laki-laki secara adil dan setara dalam memperoleh akses pelayanan pendidikan, berpartisipasi aktif secara seimbang, memiliki kontrol terhadap sumber-sumber pembangunan pendidikan, serta menikmati manfaat yang sama dari hasil pembangunan pendidikan. Adapun tujuan buku ini yakni sebagai panduan satuan pendidikan dalam memahami hal-hal berikut.

Indikator Sekolah Responsif Gender

- a. Konsep dasar dan standardisasi sekolah responsif gender.
 - b. Indikator sekolah responsif gender
 - c. Pelaksanaan sekolah responsif gender.
 - d. Monitoring dan evaluasi sekolah responsif gender.
2. Hasil

Hasil yang secara umum dapat diperoleh dari buku ini yakni setiap pihak memiliki acuan pemahaman yang sama dalam menyikapi dan merespon kebijakan yang terkait dengan pengembangan sekolah responsif gender. Dengan demikian, setiap pihak memahami komponen yang digunakan sebagai acuan standardisasi, indikator, dan deskriptor pencapaiannya; sehingga semua pihak dapat menetapkan langkah-langkah kebijakan dan implementasi pengembangan sekolah responsif gender dengan parameter yang jelas.

C. Sasaran

Sasaran buku ini adalah pihak-pihak berikut.

1. Pemegang kebijakan mulai dari tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Unit Pelaksana Tingkat Daerah (UPTD), Pengawas Sekolah/Penilik, Kepala Sekolah.
2. Pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
3. Pemangku kepentingan, yaitu Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, yang relevan dengan pengembangan sekolah responsif gender.
4. Masyarakat sekolah (orang tua peserta didik dan masyarakat umum)



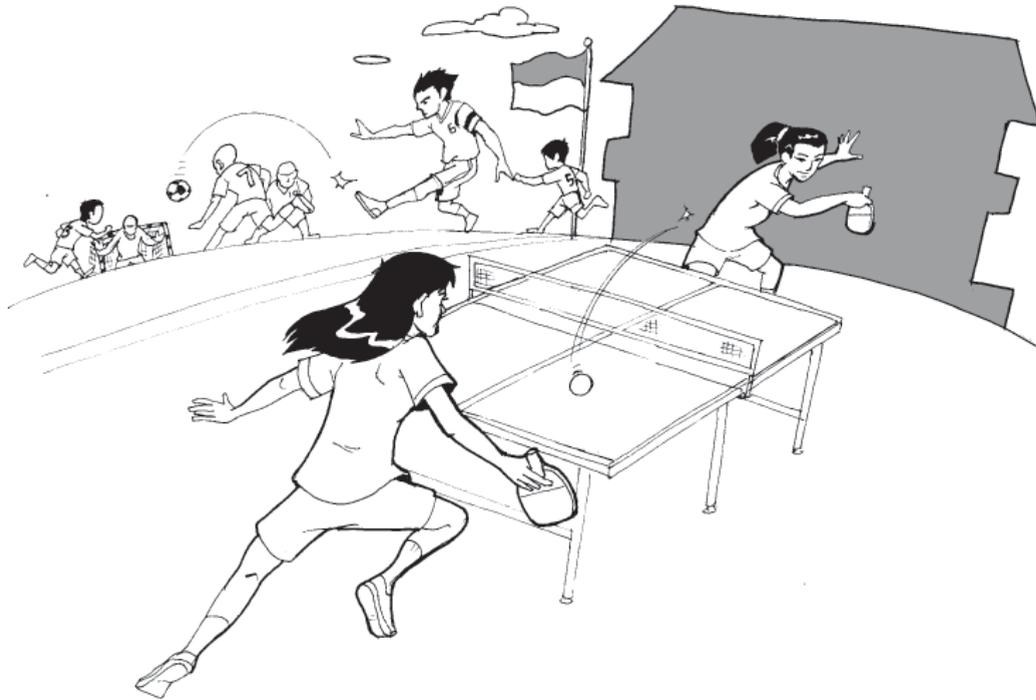
A. Pengertian

Pendidikan mengantarkan setiap pribadi mengembangkan kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, dan kreativitasnya secara optimal. Pendidikan menjadi proses terpenting yang harus dilampai dengan benar dalam tumbuh kembang seorang anak menuju kedewasaan. Kedewasaan yang dicapai melalui dunia pendidikan memberikan peluang agar setiap pribadi tidak menjadi beban bagi pihak lain, dan sebaliknya ia dapat memberikan sumbangan berharga bagi kehidupan yang dijalannya secara lebih bermakna.

Sekolah responsif gender adalah sekolah dikembangkan dengan (1) mengoptimalkan pencapaian prestasi akademik peserta didik, kecakapan sosial, keterampilan motorik; (2) tersedianya dukungan lingkungan fisik maupun budaya masyarakat yang sehat, aman, dan nyaman; dan (3) terlayannya kebutuhan spesifik peserta didik perempuan dan laki-laki secara seimbang. Pada sekolah responsif gender semua pihak (tenaga pendidik, tenaga kependidikan, orangtua, tokoh dan anggota masyarakat di sekitarnya, peserta didik laki-laki dan perempuan) menyadari akan pentingnya keadilan dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, praktik-praktik pendidikan dan pembelajaran di sekolah dilaksanakan setara dan adil gender. Sekolah responsif gender diharapkan mampu melayani kebutuhan dan membukakan kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan maupun laki-laki untuk berkembang. Oleh karena itu, sekolah mengantarkan peserta didik tanpa deskriminasi jenis kelamin agar menjadi lebih terampil dan produktif.

Implementasi gender dalam pendidikan harus dilandasi pemahaman yang tepat terhadap istilah tersebut. Gender seringkali didefinisikan secara sempit sebagai pemilahan manusia berdasarkan jenis kelamin (sex). Pemahaman ini perlu dibenahi, sebab pengertian gender mengacu secara luas, yakni pada konstruksi budaya yang dikembangkan manusia untuk memosisikan perempuan dan laki-laki dengan berkeadilan dan berkesetaraan dari segi psikologi, sosial, maupun

material. Keadilan dan kesetaraan tersebut dikembangkan tanpa mengabaikan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari nilai agama, nilai kearifan lokal, dan nilai-nilai kebangsaan.. Dengan demikian, laki-laki maupun perempuan mendapatkan manfaat pembangunan secara berkeadilan dan berketaraan.



Kesetaraan gender pada ranah sekolah diartikan sebagai situasi dan kondisi yang menyediakan peluang bagi semua peserta didik untuk mengembangkan kompetensi diri dan membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh pelabelan budaya (stereotype) yang dikonsepsi secara kaku. Hal ini bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki harus selalu sama; tetapi hak, tanggung jawab, dan kesempatannya tidak dipengaruhi oleh apakah mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Adapun keadilan gender adalah keadilan dalam memperlakukan perempuan dan laki-laki sesuai kebutuhan mereka. Perlakuan diperhitungkan dengan ekuivalen dalam hal hak, kewajiban, kepentingan, dan kesempatannya (Unesco, 2002).

Pembangunan sekolah yang responsif gender dilakukan secara komprehensif dan menjadi pertimbangan bagi setiap pelaksana pendidikan. Dalam pengembangan sekolah responsif gender, seluruh elemen pendidikan diharapkan bersikap responsif gender sehingga lebih menjamin persamaan hak perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses pelayanan pendidikan, dapat berpartisipasi aktif secara

seimbang, memiliki kontrol yang sama terhadap sumber-sumber pembangunan pendidikan, serta menikmati manfaat yang sama dari hasil pembangunan pendidikan. Sekolah bersinergi dengan berbagai institusi lain, para tokoh, dan masyarakat untuk memiliki komitmen yang sama terhadap pentingnya sekolah responsif gender. Dengan demikian, generasi mendatang baik laki-laki maupun perempuan akan tumbuh dan berkembang secara optimal serta berimbang, saling menghormati, saling mendukung, lebih mandiri, serta tidak membebani pihak yang lain.



B. Isu-isu Gender

1. Pengertian

Isu gender adalah suatu kondisi ketimpangan yang dialami warga sekolah (peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan) dalam hal pemerolehan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat penyelenggaraan sekolah sebagai akibat dominasi salah satu kelompok jenis kelamin tertentu sehingga merugikan kelompok jenis kelamin yang lain. Kondisi buruk ini harus diatasi sehingga semua warga sekolah mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan diri, baik dari segi akademik, profesionalitas, dan personalitas.

2. Isu Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan Gender di Lingkungan Sekolah

Indikator untuk menemukan dan mendeskripsikan isu ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender (KKG) dapat dilakukan berdasarkan data kuantitatif maupun kualitatif. Penemuan dan pendeskripsian dilakukan dengan menyediakan data terpilah gender. Data terpilah dan informasi terpilah berdasarkan jenis kelamin (*sex disaggregated data*) adalah data kuantitatif atau data kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin warga sekolah laki-laki dan perempuan. Data dan informasi terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki dan perempuan dalam setiap aspek penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Misalnya angka yang menunjukkan jumlah, prestasi, partisipasi dalam pembelajaran/organisasi/kegiatan sekolah, hobi peserta didik perempuan dan laki-laki; jumlah pendidik, pimpinan sekolah, karyawan, kepala bagian, kepala subbagian tenaga kependidikan perempuan dan laki-laki; dan susunan pengurus komite sekolah perempuan dan laki-laki. Data terpilah gender tersebut untuk melihat disparitas maupun indeks paritas gender di lingkungan sekolah.

Isu-isu gender yang telah diketahui berdasarkan data kuantitatif menjadi pertimbangan dalam meningkatkan akses, partisipasi, kontrol, dan mutu yang dilakukan warga sekolah. Tabel berikut dapat digunakan sebagai panduan menghimpun berbagai rencana pembangunan sekolah baik pada tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, maupun evaluasi sekolah responsif gender.

No.	ISU GENDER	Perencanaan		Penganggaran		Pelaksanaan		Pemantauan		Evaluasi	
		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
1.	Akses										
2.	Partisipasi										
3.	Kontrol										
4.	Manfaat										

Adapun isu gender secara kualitatif dapat diidentifikasi berdasarkan fakta-fakta keadilan dan kesetaraan yang berupa stereotipi, subordinasi, marginalisasi, beban ganda ataupun kekerasan berbasis gender. Stereotipi adalah pelabelan negatif pada diri seseorang pada jenis kelamin tertentu, misalnya perempuan dilabeli sebagai sosok yang emosional, cerewet, lamban; sebaliknya diuntungkan sebagai sosok yang rasional, cekatan, tegas, dan berani menghadapi tantangan. Adapun subordinasi memosisikan salah satu kelompok jenis kelamin sebagai ‘warga kelas dua’ sesudah kelompok yang lain. Misalnya, pemilihan ketua cenderung pada laki-laki sedangkan sekretaris lebih sesuai jika perempuan. marginalisasi menunjukkan bahwa perempuan terpinggirkan, posisi pejabat sekolah dipilih berdasarkan jenis kelamin tertentu (laki-laki) dan perempuan tidak diperhitungkan keberadaannya jika tidak dalam situasi terpaksa. Adapun beban ganda adalah penyerahan tanggungjawab secara berlebihan pada salah satu pihak. Misalnya, dalam diskusi kelompok peserta didik perempuan ditugasi untuk berpikir, seklaigus menulis hasil diskusi, menulis laporan, dan menyerahkan kepada guru; sedangkan peserta didik laki-laki hanya berpartisipasi dalam diskusi saja.

Isu-isu gender di lingkungan sekolah dapat diidentifikasi dan dihimpun secara kualitatif dengan tabel berikut.

No.	Isu Gender	Standar Nasional Pendidikan (8+)									
		Isi Pelajaran	SKL	Proses	TP dan K	Sarpras	Pengelolaan	Pembiayaan	Penilaian	Peserta Didik	Partisipasi Masyarakat
1.	Stereotipi (Pelabelan Negatif)										
2.	Subordinasi										
3.	Marginalisasi										
4.	Beban Ganda										

C. Indikator Sekolah Responsif Gender

Berikut adalah jabaran indikator sekolah responsif gender sebagai rambu-rambu pengukuran perencanaan dan pelaksanaan.

Tabel 2.3 Standar Isi

NO.	KOMPONEN/STANDAR	INDIKATOR	DESKRIPTOR	KETERANGAN
1	Isi	1.1. Integrasi gender dalam silabus dan RPP	1.1. Materi gender terintegrasi dalam komponen pembelajaran pada silabus dan RPP	Gender dapat terintegrasi pada: 1. Penjabaran indikator, 2. tujuan, 3. bahan ajar
		1.2. Integrasi gender pada bahan ajar	1.2. Bahan ajar dirancang berisi materi yang mengintegrasikan gender dan relevan dengan mapel	Gender dapat terintegrasi secara substantif pada mapel seperti: 1. PKn 2. IPS 3. IPA 4. Bahasa Indonesia, dll
		1.3. Integrasi gender dalam Media pembelajaran	1.4. Media pembelajaran dirancang berisi materi yang mengintegrasikan gender dan relevan dengan mapel	1.4.1. Guru memilih dan menentukan media yang dapat membantu peserta didik menginternalisasi nilai-nilai yang mendorong pengembangan potensi seluruh peserta didik secara optimal

Tabel 2.4 Standar Kompetensi Lulusan

NO.	KOMPONEN/STANDAR	INDIKATOR	DESKRIPTOR	KETERANGAN
2.	Kompetensi Lulusan	1.1. Prestasi akademik perempuan dan laki-laki	1.1.1. Laki-laki dan perempuan mempunyai prestasi akademik yang baik dengan kesenjangan yang semakin kecil	1.1.1 Sekolah berupaya mendorong pengembangan potensi akademik peserta didik laki-laki dan perempuan secara optimal
		1.2. Prestasi non akademik perempuan dan laki-laki	1.2.1. Laki-laki dan perempuan mempunyai prestasi non akademik yang baik	1.2.1.1 Sekolah berupaya mendorong pengembangan potensi non akademik peserta didik laki-laki dan perempuan secara optimal

		1.3 Sikap saling menghargai antara perempuan dan laki-laki	1.3.1. Bersikap dan berperilaku santun kepada siapapun	1.3.1.1 tidak melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual berbasis perbedaan jenis kelamin
			1.3.2. menghindari peran yang stereotipi gender	1.3.2.1.. Menghindari tindakan-tindakan yang menimbulkan diskriminasi gender terhadap perempuan dan laki-laki.
			1.3.3. Demokratis, akomodatif dan toleran	1.3.3.1. Menghargai pendapat orang lain tanpa melihat jenis kelaminnya
		1.3.4. Tidak melakukan tindakan mengganggu rasa aman dan nyaman bagi orang lain		1.3.4.1. Tidak menggunakan simbol, gambar, poster, lukisan dan bahasa verbal maupun non verbal yang dapat menimbulkan pelecehan seksual bagi perempuan dan laki-laki.

Tabel 2.5 Standar Proses

NO.	STANDAR/KOMPONEN	INDIKATOR	DESKRIPTOR	KETERANGAN
3	Proses Pembelajaran	3.1 Metode pembelajaran responsive gender.	2.1.1 Murid laki-laki dan perempuan secara setara aktif dalam mengemukakan gagasan, bertanya, dan mengkritisi gagasan yang lain tanpa perasaan minder (inferior) atau lebih hebat (superior).	3.3.1.1. Kenyataan guru lebih banyak menggunakan metode ekspositori sehingga menguntungkan anak laki-laki. Guru kurang luwes dalam menggunakan metode yang efektif, sehingga lebih menguntungkan siswa laki-laki
		3.2 Model pembelajaran responsive gender.	3.2.1. Membentuk kelompok-kelompok yang anggotanya terlibat aktif dalam bertukar gagasan dan pemecahan masalah bersama dengan jumlah laki-laki dan perempuan secara seimbang.	3.3.2.1. Guru memberi kesempatan secara bebas kepada siswa untuk memilih kelompoknya, kenyataannya terjadi kecenderungan dominasi kelompok laki-laki dalam penentuan kelompok

			3.2.2. Siswa laki-laki dan perempuan mampu bekerjasama tanpa ada subordinasi dan marginalisasi jenis kelamin tertentu.	
			3.2.3. Guru mampu mendorong murid laki-laki dan perempuan berlomba untuk maju, dan terampil memadukan strategi pembelajaran kompetitif dan kooperatif.	
		3.3 Pengelolaan kelas responsive gender.	3.3.1. Guru memfasilitasi cara belajar murid laki-laki dan perempuan secara beragam, karena keduanya mempunyai pengalaman perlakuan yang berbeda akibat konstruksi sosial	3.3.3.1. Guru selalu menunjuk anak laki-laki sebagai pemimpin atau ketua kelas
			3.3.2. Guru memfasilitasi siswa laki-laki dan perempuan untuk menjadi pemimpin di kelas	
		3.4 Penugasan yang tidak membedakan.	3.4.1 Murid laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama, dan aktif mengajukan pertanyaan, membuat dugaan, mengumpulkan data-data serta mengambil kesimpulan	3.3.4.1 Memberikan kesempatan yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan untuk memperoleh akses dan partisipasi dalam pembelajaran (tidak didominasi oleh salah satu jenis kelamin)
			3.4.2 Guru memberikan contoh-contoh keberhasilan, prestasi yang sama antara siswa perempuan dan laki-laki	

		2.5. Kegiatan pembelajaran responsif gender (langkah-langkah proses pembelajaran)	3.5.1. langkah-langkah pembelajaran pembukaan, inti, dan penutupan	3.3.5.1 .Dalam menerapkan tahapan ini, guru lebih cenderung memberi kesempatan dan perhatian kepada anak perempuan.
--	--	---	--	---

Tabel 2.6 Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

NO.	KOMPONEN/STANDAR	INDIKATOR	DESKRIPTOR	KETERANGAN
4.	Tenaga Pendidik dan Kependidikan	4.1. Proporsi Tenaga guru laki dan perempuan	4.1.1. Jumlah guru laki dan perempuan pada setiap jenjang dan bidang studi;	4.1.1. Pada kenyataannya guru perempuan lebih dominan disetiap jenjang pendidikan
			1.2. proporsi laki dan perempuan berdasarkan	4.1.2. Kenyataannya jumlah guru laki-laki lebih dominan mendapatkan kesempatan pendidikan lebih tinggi
			1.3 Jumlah laki-dan perempuan yang mendapatkan sertifikasi guru setiap jenjang;	4.1.3 Kenyataannya yang mengikuti sertifikasi guru lebih dominan laki-laki
		4.2 Proporsional tenaga kependidikan	4.2.1 Proporsi tenaga kependidikan laki dan perempuan (pustakawan, laboran dll)	4.2.1 Kenyataannya Jumlah tenaga kependidikan lebih didominasi laki-laki
			4.2.2 Proporsi laki-laki dan perempuan dalam pendidikan penjurusan	4.2.2. Laki-laki lebih dominan mengikuti kegiatan penjurusan
			4.2.3 Promosi jabatan laki dan perempuan secara seimbang.	4.2.3. Promosi jabatan lebih banyak laki dibanding perempuan
		4.3 Aktifitas pendidik dan tenaga pendidik dalam kegiatan siswa	4.3.1 Pembimbingan aktivitas siswa dan peminatan laki dan perempuan	4.3.1 Kenyataannya guru laki-laki lebih dominan untuk membimbing dan mendampingi kegiatan kesiswaan yang hard/keras.

			4.3.2. Kegiatan pembimbingan melanjutkan studi baik laki maupun perempuan	4.3.2 Kenyataannya guru laki-laki lebih mengarahkan anak laki untuk memilih fakultas/jurusan yang hard sciencis, sdg prp yang soft sciencis
		4.4 Perilaku menyimpang dari pendidik dan tenaga kependidikan (kekerasan fisik, psikologis, keuangan dan verbal)	4.4.1 Berkurangnya jumlah kekerasan fisik dan non fisik sexual terhadap siswa laki dan perempuan	4.4.1.1 Kenyataannya Jumlah tenaga kependidikan lebih didominasi laki-laki
			4.4.2 Berkurangnya jumlah guru yang meminta imbalan kepada siswa	4.4.2.1 Laki-laki lebih dominan mengikuti kegiatan penjenjangan.
			4.4.3 Berkurangnya kebiasaan guru berkomunikasi dengan siswa yang kurang simpatik (mengejek, membentak, mengolok-olok, merendahkan dll)	4.2.3 Promosi jabatan lebih banyak laki dibanding perempuan

Tabel 2.7 Standar Sarana dan Prasarana

NO.	KOMPONEN/STNADAR	INDIKATOR	DESKRIPTOR	KETERANGAN
5.	Sarana dan Prasarana	5.1 Penyediaan Toilet	5.1.1 Jumlah toilet proporsional bagi pengguna peserta didik perempuan dan laki-laki	5.1.1.1 Perbandingan ideal toilet untuk perempuan adalah: 1: 20, dan laki-laki 1: 30. Hal ini dikarenakan waktu yang digunakan perempuan untuk menggunakan toilet lebih lama dibandingkan laki-laki.
			5.1.2 Fasilitas toilet bagi peserta didik perempuan dan laki-laki terpisah	5.1.2.1 Fasilitas toilet perlu dipisah untuk menumbuhkan rasa aman dan nyaman.

			5.1.3 Tersedia tempat pembuangan sampah tertutup khususnya pada toilet perempuan	5.1.3.1 Perempuan yang sedang menstruasi membutuhkan tempat sampah tertutup
	5.2. Penataan ruang kelas		5.2.1 Desain meja bagian depan tertutup	5.2.1.1 Desain ini dapat menjaga keamanan dan kenyamanan peserta didik dan guru mengikuti PBM
			5.2.2. Tempat duduk diatur bergantian (depan belakang maupun kiri kanan)	5.2.2.1 Memberi kesamaan akses dan partisipasi peserta didik perempuan dan laki-laki dalam pembelajaran
			5.2.3 Gambar-gambar tokoh di kelas menampilkan laki dan perempuan secara proporsional	5.2.3.1 Gambar tersebut memberi inspirasi dan semangat bagi peserta didik perempuan dan laki-laki untuk meneladani ketokohnya
	5.3 Penataan taman sekolah		5.3.1 Taman sekolah terbuka dan mudah teramati	5.3.1.1 Mencegah terjadinya kekerasan fisik, psikologis, dan seksual
			5.3.2 Pemanfaatan taman sekolah untuk pesan-pesan kesetaraan dan keadilan gender	5.3.2.1 Memberi edukasi kesetaraan dan keadilan gender bagi warga sekolah seperti pamlet berisi pesan anti kekerasan, pesan berprestasi unggul, dll
	5.4 Sistem keamanan sekolah		5.4.1 Pembentukan kelompok teman sebaya antar peserta didik untuk saling menjaga keamanan dari berbagai tindakan diskriminasi gender, kekerasan fisik, psikologis dan seksual	5.4.1.1 Untuk menumbuhkan kepekaan peserta didik dalam mencegah terjadinya tindakan diskriminasi gender, kekerasan fisik, psikologis dan seksual

		5.4.2 Membangun komunikasi terbuka antara warga sekolah untuk mencegah tindakan diskriminasi gender, kekerasan fisik, psikologis dan seksual	5.4.2.1 Untuk mempercepat deteksi adanya potensi tindakan diskriminasi gender, kekerasan fisik, psikologis dan seksual sehingga dapat diambil jalan keluar secara cepat
		5.4.3 Tersedianya perangkat CCTV untuk memperkuat situasi keamanan sekolah	5.4.3.1 Jaringan CCTV di area tertentu untuk mempermudah pengawasan dan penjagaan keaaman warga sekolah dan fasilitas sekolah.
	5.5 Ruang khusus layanan	5.5.1 Tersedianya ruang konsultasi yang menjamin kenyamanan peserta didik dalam menyampaikan persoalan pribadinya	5.5.1.1 Ruang tertutup dan aman sehingga peserta didik dapat secara terbuka menyampaikan persoalan pribadinya tanpa rasa tertekan.
		5.5.2 Tersedianya ruang khusus ganti pakaian yang penggunaannya terpisah antara laki-laki dan perempuan	5.5.2.1 Perempuan dan laki-laki bisa berganti pakaian secara aman dan nyaman
		5.5.3 Tersedianya Ruang UKS yang terpisah bagi laki-laki dan perempuan dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan spesifiknya	5.5.3.1 Mampu memenuhi kebutuhan layanan yang aman dan nyaman serta memenuhi kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki yang berbeda
		5.5.4 Tersedianya ruang ibadah yang mendukung kesyukuran beribadah bagi laki dan perempuan	5.5.4.1 Ruang ibadah harus memperhatikan perbandingan antara jumlah pengguna dengan luas ruangan dan menjamin tidak adanya dominasi penggunaan ruang ibadah oleh salah satu jenis kelamin

Tabel 2.8 Standar Pengelolaan

NO.	KOMPONEN/STANDAR	INDIKATOR	DESKRIPTOR	KETERANGAN
6.	Pengelolaan	6.1 Visi dan misi sekolah	6.1.1 Visi dan misi sekolah mendukung upaya mewujudkan pendidikan yang adil dan setara gender	6.1.1.1 Visi dan misi sekolah memuat nilai-nilai yang dapat digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan sekolah responsif gender, baik pada kegiatan akademik maupun non akademik. Misal: memuat kata seperti adil, setara, non diskriminatif, hak asasi manusia, dll.
		6.2 Nilai-nilai dan norma yang berlaku di sekolah	6.2.1 Aturan-aturan sekolah yang menjamin adanya kesamaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi semua warga sekolah	6.2.1.1 Aturan pemilihan pengurus kelas, Majelis Perwakilan kelas, OSIS, kegiatan ekstra kurikuler yang menjamin kesamaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan
		6.3 Rencana kerja sekolah	6.3.1 Memuat aktivitas yang mendorong kesamaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan dalam berbagai kegiatan sekolah	6.3.1.1 Mengadakan kegiatan lomba yang mampu meningkatkan pemahaman gender bagi warga belajar melalui pemilihan topik-topik kontekstual terkait peringatan hari-hari besar (Kartini, Ibu, Pendidikan, Pahlawan, dll) berupa: lomba lukis, menulis, pidato, majalah dinding, poster, klipping, dll dengan tema Pada kegiatan jeda semester
		6.4 Struktur organisasi sekolah	6.4.1 Struktur organisasi di sekolah merepresentasikan keterwakilan perempuan dan laki-laki secara proposional 6.4.2 Struktur organisasi di sekolah tidak bersifat sub-ordinatif yang merugikan salah satu jenis kelamin dalam alokasi pekerjaannya	6.4.1.1 Keterwakilan perempuan dan laki-laki dalam: Organisasi Sekolah Komite sekolah Kepengurusan OSIS 6.4.2.1 Perempuan dan laki-laki berpeluang sama untuk menduduki jabatan ketua, sekretaris, bendahara, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, dll.

	6.5 Penugasan	6.5.1 Kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan penugasan sekolah 6.5.1. Kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan penugasan sekolah	6.5.1.1 Perempuan dan laki-laki berpeluang sama untuk melaksanakan tugas sekolah seperti: 1. Koordinator pelaksanaan ujian 2. Ketua even perlombaan 3. Pendamping siswa mengikuti perlombaan di luar sekolah 4. Mengikuti kompetisi 5. Petugas upacara, dll
	6.6 Pengembangan karir dan promosi	6.6.1 Kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk mengembangkan Karir dan promosi	6.6.1.1 Perempuan dan laki-laki berpeluang sama untuk mengikuti: 1. Studi lanjut 2. Diklat 3. Penelitian
	6.7.1 Kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk memberikan pendapat sebagai dasar pengambilan keputusan	6.7.1 Kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk memberikan pendapat sebagai dasar pengambilan keputusan	6.7.1.1. Perempuan dan laki-laki berpeluang sama untuk: Menyampaikan saran/ pendapat Mengambil keputusan penting di sekolah

Tabel 2.9 Standar Pembiayaan

NO.	KOMPONEN/ STANDAR	INDIKATOR	DESKRIPTOR	KETERANGAN
7.	Pembiayaan	7.1. menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di sekolah	7.1.1 Penyediaan Anggaran Kesetaraan Gender 7.1.2 Penyediaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan spesifik gender	7.1.1.1 Contoh anggaran kesetaraan gender antara lain: 1. Integrasi gender pada pemberian beasiswa 2. Integrasi gender pada penyediaan sarpras 3. Integrasi gender pada pengiriman diklat guru, dll 7.1.2.1 Contoh anggaran untuk pemenuhan kebutuhan spesifik gender antara lain: 1. penyediaan pembalut wanita, 2. Penyediaan pil anti nyeri haid, dll

		7.1.3 Penyediaan anggaran untuk Pelembagaan Kesetaraan Gender	7.1.3.1 Contoh anggaran untuk pelembagaan pengarusutamaan gender antara lain: 1. Pembentukan pokja gender dan gender focal point 2. Peningkatan kapasitas pokja dan gender focal point 3. Penyusunan data terpilah pendidikan
	7.2. Adanya kesamaan akses dan partisipasi bagi perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan anggaran sekolah	7.2.1 Adanya representasi perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan anggaran	7.2.1.1 Representasi perempuan dan laki-laki dalam tim anggaran sekolah
	7.3 Adanya kesamaan akses dan partisipasi bagi perempuan dan laki-laki dalam memonitor penggunaan anggar sekolah	7.3.1 Adanya representasi perempuan dan laki-laki dalam memonitor penggunaan anggar sekolah	7.3.1.1 Representasi perempuan dan laki-laki dalam memonitor penggunaan anggar sekolah

Tabel 2.10 Standar Penilaian

NO.	KOMPONEN/ STANDAR	INDIKATOR	DESKRIPTOR	KETERANGAN
8.	Penilaian	8.1 Penilaian adil dan setara	8.1.2 Standar penilaian memperhatikan perbedaan kodrat perempuan dan laki-laki	8.2.1.1. Penilaian yang melibatkan aspek fisik seperti olah raga menggunakan standar yang berbeda, (standar nilai kecepatan/ waktu tempuh berlari / berenang antara laki-laki dan perempuan, lari 100 meter laki-laki X menit, perempuan X+... menit mendapat nilai yang sama) 8.2.1.2. Pemberian kesempatan untuk ujian/ulangan susulan karena peserta didik sedang berhalangan/sakit berkaitan dengan fungsi reproduksinya (misal: perempuan tidak bisa mengikuti ujian karena nyeri hebat saat menstruasi).

		8.1.2 P roses penilaian dilakukan secara obyektif bagi peserta didik laki-laki maupun perempuan.	8.2.2.1 Mengembangkan alat penilaian yang tidak menyulitkan siswa dilihat dari jenis kelaminnya. Misal: Materi soal ujian tidak cenderung menguntungkan salah satu jenis kelamin karena mereka punya pengalaman yang lebih dibandingkan jenis kelamin yang lain terkait soal tersebut (soal menyebut nama tokoh-tokoh sepak bola, balap motor, lebih menguntungkan laki-laki, isi bacaan tentang selebritis lebih menguntungkan perempuan).
--	--	--	---

Tabel 2.11 Peserta Didik

NO.	KOMPONEN/ STANDAR	INDIKATOR	DESKRIPTOR	KETERANGAN	
9.	Peserta Didik: Keimanan Kepribadian baik Kematangan sosial	9.1 Proporsi siswa didik laki dan perempuan (bagi sekolah yang peserta didiknya laki-laki dan perempuan)	9.1.1 Jumlah laki-laki dan perempuan harus berimbang atau kontekstual	9.1.1.1 Jumlah anggota kelas berimbang antara siswa laki-laki dan perempuan.	
			9.1.2. Semua siswa mendapat fasilitas lingkungan yang responsif gender	9.1.2. 2 Jumlah pengurus organisasi sekolah berimbang antara siswa laki-laki dan perempuan	
				9.1.2.1 Sekolah memiliki fasilitas lingkungan yang responsif gender yang dimanfaatkan oleh semua siswa	
			9.2 Tingkat kelulusan siswa laki dan perempuan	9.2.1. Setiap siswa laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan berprestasi secara optimal	9.2.1.1 Menghindari dominasi prestasi pada salah satu jenis kelamin untuk meraih prestasi
					9.2.1.2 Setiap siswa berhak mendapatkan penghargaan/ perhatian yang sama dari sekolah.
			9.3 Tingkat penyimpangan (pelecehan dan kejahatan) yg dilakukan siswa	9.3.1 Tidak terjadi penyimpangan (pelecehan dan kejahatan) yang dilakukan siswa.	9.3.1.1 Sekolah menjadi lingkungan belajar yang aman.
		9.3.1.2 Sekolah menjadi lingkungan belajar bersosialisasi yang sehat .			
		9.4 Aktivitas siswa responsif gender	9.4.1. Siswa berpartisipasi aktif mewujudkan sekolah responsif gender	9.4.1. Siswa mendapat bimbingan dan pendampingan untuk berpartisipasi mewujudkan sekolah responsif gender.	

Tabel 2.12 Partisipasi Masyarakat

NO.	KOMPONEN/ STANDAR	INDIKATOR	DESKRIPTOR	KETERANGAN
10.	Partisipasi masyarakat	10.1. Komposisi dan peran Komite Sekolah	10.1.1 Setiap individu memperoleh kesempatan sama dalam jabatan komite sekolah sesuai dengan kompetensinya.	10.1.1 Komposisi peengelola komite sekolah terdiri dari perempuan dan laki-laki secara berimbang
			10.1.2 Jumlah kepengurusan perempuan dan laki-laki seimbang.	10.1.2 Dominasi salah satu jenis kelamin dalam pengelolaan komite sekolah harus dihindari
		10.2. Hubungan baik antara sekolah dengan masyarakat dalam mewujudkan sekolah responsif gender	10.2.1 Masyarakat menerima implementasi sekolah responsif gender	10.2.1 Kesiadaan masyarakat menerima komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesetaraan dan keadilan gender. gender sangat tinggi
			10.2.3 Kesiadaan masyarakat mendukung terbangunnya sekolah responsif gender .	10.2.2 Kesiadaan masyarakat mempraktekkan nilai-nilai adil dan setara gender di lingkungan masyarakat
				10.2.3 Kesiadaan masyarakat mendukung terbangunnya sekolah responsif gender .
		10.3. Hubungan baik antara sekolah dengan orang tua murid	10.3.1 Orangtua (bapak dan ibu) menjalin komunikasi dengan sekolah dalam mendukung implementasi sekolah responsif gender	10.3.1. 1 Adanya keseimbangan peran bapak dan ibu dalam urusan sekolah anak
				10.2.1. Kesiadaan orangtua menerima komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesetaraan dan keadilan gender. gender sangat tinggi
			10.3.2 Orangtua menerima implementasi sekolah responsif gender	10.2.2. Kesiadaan orangtua mempraktekkan nilai-nilai adil dan setara gender di lingkungan keluarga
				10.2.3. Kesiadaan orangtua mendukung terbangunnya sekolah responsif gender

Pelaksanaan Sekolah Responsif Gender

A. Penguatan Kelembagaan SRG

1. Pengertian Penguatan Kelembagaan SRG

Penguatan kelembagaan SRG dapat diartikan sebagai upaya pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan komponen institusi sekolah untuk mendukung dan mengoptimalkan (1) pencapaian prestasi akademik peserta didik, kecakapan sosial, keterampilan motorik; (2) tersedianya lingkungan fisik maupun budaya masyarakat yang sehat, aman, dan nyaman; dan (3) terlayannya kebutuhan spesifik peserta didik perempuan dan laki-laki secara seimbang. Pada sekolah responsif gender semua pihak (tenaga pendidik, tenaga kependidikan, orangtua, tokoh dan anggota masyarakat di sekitarnya, peserta didik laki-laki dan perempuan) menyadari akan pentingnya keadilan dan kesetaraan gender.

2. Tujuan Penguatan Kelembagaan SRG

Tujuan penguatan kelembagaan sekolah responsif gender yakni seperti berikut.

- a. Terbentuknya Kelompok Kerja Gender dan Gender Focal Point pada lembaga sekolah.
- b. Tersusunnya perencanaan dan penganggaran sekolah yang responsif gender.
- c. Tersosialisasikannya program sekolah responsif gender pada peserta didik, tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan, dan masyarakat (orang tua/wali murid).
- d. Terlaksanakannya program kegiatan sekolah responsif gender.
- e. Telaksanakannya program kegiatan monitoring dan evaluasi sekolah responsif gender berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

3. Strategi Penguatan Kelembagaan SRG

Strategi yang ditempuh untuk melaksanakan penguatan kelembagaan sekolah responsif gender yakni sebagai berikut.

a. Pendampingan (Advokasi) dan Fasilitasi

Pendampingan dan fasilitasi dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan anggota/calon anggota Satuan Petugas (Satgas) Gender tentang kesetaraan dan keadilan gender yang akan berdampak pada perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku warga sekolah agar responsif gender. Pendampingan diprogramkan melalui kegiatan orientasi bagi Satgas dan sosialisasi bagi warga sekolah dalam bentuk misalnya, seminar, diskusi panel, sarasehan, konsultasi, dan *focus group discussion* (FGD), dan *workshop*. Kegiatan dijadwalkan dengan alokasi waktu tertentu dan dengan hasil yang terukur.

b. Pemetaan Potensi dan Kelompok Kerja (Pokja) Gender

Pemetaan potensi dimaksudkan untuk menghimpun informasi tentang peta sumberdaya manusia, sarana dan prasarana pendukung untuk mewujudkan sekolah responsif gender. Hasil pemetaan sarana dan prasarana dimaksudkan untuk memetakan kondisi awal sekolah sebagai titik tolak pengembangan program sekolah responsif gender. Adapun pembentukan Satgas Gender dimaksudkan agar sekolah memiliki tim sumber daya dan juru bicara (*gender focal point*) yang handal dalam pengembangan sekolah responsif gender. Satgas gender menjadi tumpuan untuk memberikan penjaminan keberlangsungan dan keberlanjutan program sekolah responsif gender. Satgas gender sekaligus bertanggungjawab untuk menyediakan informasi bagi warga sekolah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi sekolah responsif gender. Komposisi Pokja Gender dapat disusun dengan komposisi sebagai berikut.

- 1). Ketua
- 2). Wakil Ketua
- 3). Sekretaris
- 4). Bendahara

5). Tim Pengembang (Misalnya: Perencanaan dan Anggaran Sekolah, *Gender Focal Point*, Perangkat Pembelajaran, Media Komunikasi Informasi)

c. Pengembangan Materi dan Media KIE tentang KKG

Pengembangan materi dan media KIE dimaksudkan untuk dimasukkan untuk menyiapkan segala kebutuhan informasi dan media KIE terkait keadilan dan kesetaraan gender serta implementasinya dalam program sekolah responsif gender. Materi dan media yang disiapkan misalnya dalam wujud buku, majalah, jurnal ilmiah, contoh perangkat pembelajaran responsif gender, data sekolah yang terpilah gender, contoh perencanaan dan penganggaran responsif gender, gambar, poster, iklan layanan sosial, film, dan brosur. Bahan dan media tersebut disediakan bagi warga sekolah sesuai dengan peran dan tugas masing-masing.

d. Pengembangan Jaringan/Sistem Informasi

Pengembangan jaringan/sistem informasi bertujuan untuk menjalin komunikasi dengan lembaga pemerintah atau institusi lain yang terkait untuk saling bertukar informasi dan melaksanakan hubungan kerja sama untuk mendukung program sekolah responsif gender. Pertukaran informasi dan kerjasama dapat dilakukan misalnya dengan melaksanakan kegiatan diskusi berkala, seminar, pertukaran sumber bacaan.

e. Pengembangan Sistem Evaluasi

Pengembangan sistem evaluasi memiliki peran yang sangat penting yakni untuk melakukan pengukuran tingkat keberhasilan pengembangan sekolah responsif gender. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi dapat dilakukan pada tengah (pelaksanaan perencanaan dan penganggaran sekolah) dan akhir tahun. Alat evaluasi yang digunakan dapat diperiksa pada buku Standar Sekolah Responsif Gender.

4. Materi Penguatan Kelembagaan SRG

Materi penguatan kelembagaan mencakup hal-hal berikut.

- a. Konsep Dasar Gender.
- b. Kebijakan pengarusutamaan gender pada satuan pendidikan.

c. Isu-isu gender di lingkungan satuan pendidikan.

d. Implementasi pengarusutamaan gender pada satuan pendidikan.

- 1). Pembentukan Kelompok Kerja dan *Gender Focal Point* pada Satuan Pendidikan.
- 2). Penyusunan dan Implementasi Program Kerja
- 3). Monitoring dan Evaluasi.
- 4). Pelaporan

5. Mitra dalam Penguatan Kelembagaan SRG

Pihak-pihak yang dapat dipilih sebagai mitra dalam implementasi keadilan dan kesetaraan gender di lingkungan sekolah yakni sebagai berikut.

- a. Kelompok Kerja dan Gender Focal Point pada Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) di kabupaten/Kota.
- c. Pusat Studi Wanita/Gender di Perguruan Tinggi.
- d. Tokoh masyarakat dengan kompetensi yang relevan.

B. Langkah-Langkah Pelaksanaan SRG

Pelaksanaan sekolah responsif gender dilakukan dalam empat langkah berikut.

1. Perencanaan SRG

- a. Pembentukan Satuan Petugas (Satgas)/Kelompok Kerja (Pokja) Gender Sekolah

Tujuan	Input	Materi	Strategi Pelaksanaan	Output	Mitra/Sumber
Terbentuknya Tim Satgas/Pokja Gender Sekolah	1. Pendidik 2. Tenaga kependidikan 3. Siswa	Struktur organisasi Satgas	Advokasi dan fasilitasi	Susunan Organisasi Satgas/Pokja Gender Sekolah dengan keterwakilan perempuan dan laki-laki secara seimbang.	KP3A PSW/PSG Pakar

b. Orientasi Program Sekolah Responsif Gender

kegiatan orientasi dilakukan dengan tujuan untuk membuka wawasan, menanamkan sikap, serta perilaku positif warga sekolah terkait program sekolah responsif gender. Berikut adalah tabel yang berisi panduan pelaksanaan kegiatan orientasi wawasan gender bagi warga sekolah.

Tujuan	Input	Materi	Strategi Pelaksanaan	Output	Mitra/Sumber	Waktu
Menanamkan wawasan tentang gender dan implementasinya dalam pengembangan sekolah responsif gender	Pendidik Tenaga kependidikan Siswa	<ol style="list-style-type: none"> Konsep Dasar Gender. Kebijakan pengarusutamaan gender pada satuan pendidikan. Isu-isu gender di lingkungan satuan pendidikan. Implementasi pengarusutamaan gender pada satuan pendidikan. <ol style="list-style-type: none"> Pembentukan Kelompok Kerja dan Gender Focal Point pada Satuan Pendidikan. Penyusunan dan Implementasi Program Kerja Monitoring dan Evaluasi. Pelaporan 	<ol style="list-style-type: none"> Diskusi Seminar Sarasehan 	Tertanamkannya wawasan tentang gender dan implementasinya dalam pengembangan sekolah responsif gender pada Satgas/Pokja Gender Sekolah, baik perempuan maupun laki-laki.	<ol style="list-style-type: none"> KP3A PSW/PSG Pakar 	... jam

c. Analisis Kondisi Sekolah (Program Kegiatan yang Sudah dan Belum Sesuai Indikator)

Analisis kondisi awal dilakukan dengan tujuan memetakan kondisi sekolah pada awal program sekolah responsif gender. Analisis dilakukan dengan berpedoman pada rubrik yang berisi indikator

sekolah responsif gender (Periksa Bab II dan Buku Standar Sekolah Responsif Gender). Dengan demikian akan diperoleh informasi kondisi awal sekolah terkait program-program yang telah atau belum tercapai. Hal ini sebagai titik tolak untuk menyusun perencanaan dan penganggaran sekolah dengan mengintegrasikan aspek gender. Analisis kondisi awal dapat dilakukan dengan panduan skema berikut.



d. Penyusunan Perencanaan Dan Anggaran Sekolah Responsif Gender Satgas dipandu Kasek menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah Responsif Gender

(Periksa Buku PPRG)

Monitoring Dan Evaluasi

A. Pengertian dan Tujuan

Monitoring merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pencapaian tujuan program sekolah responsif gender. Adapun evaluasi ialah proses pengolahan data dan informasi yang dikumpulkan selama proses pelaksanaan dan pada akhir kegiatan program sekolah responsif gender untuk menetapkan tingkat keberhasilan tujuan program sekolah responsif gender berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan secara terencana, berujuan untuk memberikan umpan balik, menyeluruh, objektif (menghimpun data yang sah) serta kritis, dan berkesinambungan, dan bermanfaat.

Secara lebih rinci tujuan monitoring adalah seperti berikut.

1. Mengumpulkan data dan informasi tentang kemajuan pelaksanaan program atau ketercapaian tujuan SRG.
2. Mengidentifikasi dan mendeskripsi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program SRG.
3. Memberikan masukan-masukan atau umpan balik tentang metode dan materi yang tepat untuk mencapai tujuan program SRG.
4. Menyampaikan pernyataan untuk memberikan gambaran penilaian terhadap pencapaian hasil, baik pada tengah maupun akhir kegiatan.

Adapun tujuan evaluasi yakni menganalisis data dan informasi sebagai dasar penyusunan laporan hasil penilaian terhadap program SRG (pencapaian tujuan, output, outcomes). Laporan tersebut sebagai dasar untuk menyusun perencanaan dan penganggaran program lanjutan.

B. Fungsi Monitoring dan Evaluasi

1. Fungsi Ketaatan (Compliance)

Monitoring dan evaluasi digunakan untuk menghimpun informasi tentang ketaatan seluruh pelaksana dalam proses pelaksanaan perencanaan dan penganggaran program sekolah responsif gender yang telah ditetapkan.

2. Sosialisasi Program Sekolah Responsif Gender

Hasil penyusunan perencanaan dan penganggaran sekolah selanjutnya disosialisasikan kepada pihak-pihak yang relevan, yakni pimpinan sekolah, dewan guru, dan komite sekolah. Tujuan sosialisasi yaitu membangun akases informasi pada pihak-pihak terkait, menanamkan pemahaman tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak agar dapat berpartisipasi dan melakukan kontrol, dan memetik manfaat program sekolah responsif gender. Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan oleh Satgas Program Sekolah Responsif Gender dan dapat bekerja sama dengan Kantor KP3A Kabupaten/Kota, Pokja Gender Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi. Kegiatan dapat dilakukan dalam bentuk ceramah dan pelatihan.

3. Pelaksanaan Program Sekolah Responsif Gender

Pelaksanaan program sekolah responsif gender melibatkan semua jajaran sekolah. Langkah-langkah pelaksanaan program sekolah responsif gender dapat divisualisasikan sebagai berikut.

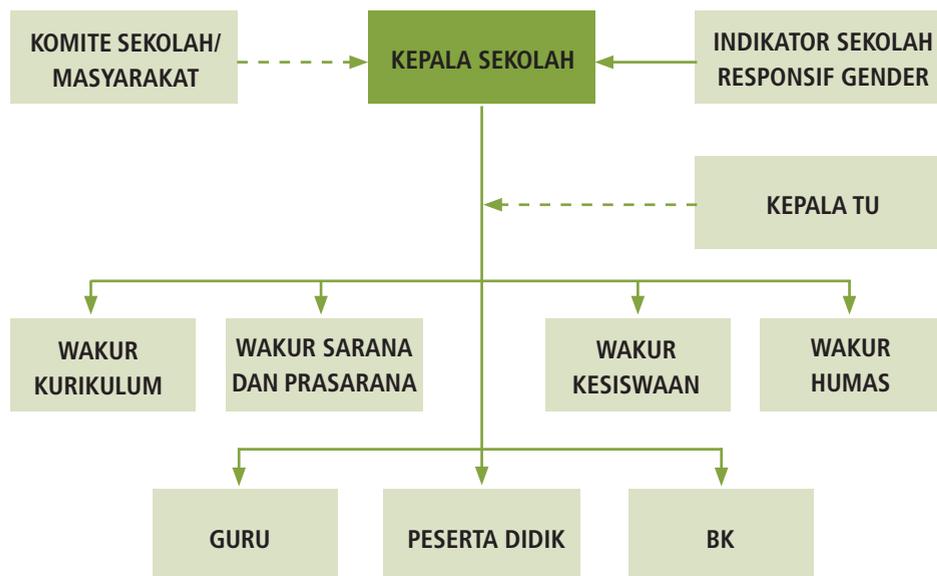


Diagram alir tersebut digunakan sebagai titik tolak untuk merumuskan peran serta setiap pihak untuk berpartisipasi dalam pembangunan sekolah responsif gender. Dengan demikian, penciptaan admosfir sosial-psikologis, lingkungan fisik, dan budaya sekolah responsif gender menjadi tanggung jawab bersama.

2. Fungsi Pemeriksaan (Auditing)

Monitoring dan evaluasi berfungsi untuk memeriksa dan menetapkan tingkat penggunaan layanan dan sumber bagi kelompok sasaran.

3. Fungsi Pelaporan (Accounting)

Monitoring dan evaluasi berfungsi untuk menyampaikan laporan kemajuan pada pertengahan pelaksanaan kegiatan dan hasil perubahan yang berhasil dicapai sesuai dengan indikator/standar penilaian sekolah responsif gender.

4. Fungsi Penjelasan (Explanation)

Monitoring dan evaluasi berfungsi untuk memberikan penjelasan atau pelaporan proses, hasil, dan kendala-kendala yang dihadapi serta solusi yang telah dipilih dalam pelaksanaan program sekolah responsif gender.

C. Prinsip-prinsip Monitoring dan Evaluasi SRG

Monitoring dan evaluasi SRG dilakukan dengan prinsi-prinsip berikut.

1. Dapat dipertanggungjawabkan.
2. Tepat waktu.
3. Sederhana.
4. Transparan.

D. Bentuk Kegiatan, Pelaksana, dan Jadwal Monitoring dan Evaluasi SRG

Bentuk, pelaksana, dan jadwal monitoring dan evaluasi dapat dibaca pada tabel berikut.

No.	Bentuk Kegiatan	Pelaksana	Waktu
1.	Internal	1. Kepala Sekolah 2. Satgas	Tengah tahun
2.	Eksternal	1. Pokja Dinas Pendidikan 2. Pengawas 3. KP3A/PSW/PSG	a. Tengah tahun b. Akhir tahun

E. Alur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi SRG

Alur pelaksanaan monitoring dan evaluasi SRG dapat dibaca pada diagram alir berikut.



F. Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data dalam Monitoring dan Evaluasi SRG

No.	Standar	Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Instrumen
1.	Isi	Paparan verbal, visual, audio dalam: 1. Kurikulum 2. Dokumen perangkat pembelajaran. 3. Buku teks. 4. Media/Sumber pembelajaran. 5. Paparan verbal guru saat mengajar dan wawancara.	1. Dokumen 2. Guru.	1. Studi dokumen 2. Wawancara 3. Observasi 4. FGD	1. Angket 2. Panduan wawancara 3. Panduan observasi
2.	Proses	1. Dokumen pembelajaran. 2. PBM	1. Silabus dan RPP. 2. KBM di kelas/ laboratorium 3. Pendidik	1. Studi dokumentasi. 2. Observasi kelas/ laboratorium 3. FGD.	1. Angket 2. Panduan wawancara 3. Panduan observasi

3.	SKL	1. Perangkat evaluasi. 2. Fakta/Proses evaluasi.	1. Dokumen. 2. Gambar/ video proses evaluasi 3. Pendidik	1. Studi dokumentasi. 2. Perekaman gambar proses evaluasi.	1. Angket wawancara 2. Panduan wawancara 3. Panduan observasi
4.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Wawasan 2. Sikap. 3. Perilaku.	1. Dokumen 2. Narasumber	1. Studi dokumentasi. 2. Wawancara. 3. FGD	1. Angket wawancara 2. Panduan wawancara 3. Panduan observasi
5.	Sarana dan Prasarana	1. Fasilitas yang ada di sekolah. 2. Prosedur /tatatertib penggunaan.	1. Fakta-fakta lapangan. 2. Dokumen 3. Narasumber	1. Observasi. 2. Studi dokumentasi. 3. Wawancara/ FGD	1. Angket wawancara 2. Panduan wawancara 3. Panduan observasi
6.	Pengelolaan	1. Dokumen. 2. Fakta lapangan. 3. Hasil wawancara	1. Dokumen. 2. Lingkungan sekolah. 3. Narasumber	1. Studi dokumentasi. 2. Observasi. 3. Wawancara/ FGD.	1. Angket wawancara 2. Panduan wawancara 3. Panduan observasi
7.	Pembiayaan	1. Dokumen. 2. Fakta lapangan. 3. hasil wawancara.	1. Dokumen. 2. Lingkungan sekolah. 3. Narasumber	1. Studi dokumentasi. 2. Observasi. 3. Wawancara/ FGD.	1. Panduan observasi 2. Panduan wawancara.
8.	Evaluasi	1. Perangkat evaluasi. 2. Proses evaluasi.	3. Dokumen. 4. c. Fakta lapangan/ kelas	1. Studi dokumentasi. 2. Observasi. 3. Wawancara/ FGD.	1. Panduan observasi 2. panduan wawancara
9	Peserta Didik	1. Dokumen. 2. Wawasan. 3. Sikap. 4. Perilaku.	1. Dokumen. 2. Lingkungan sekolah. 3. Peserta didik selaku narasumber	1. Studi dokumentasi. 2. Observasi. 3. Wawancara/ FGD.	1. angket wawancara 2. Panduan observasi 3. Panduan wawancara
10.	Partisipasi Masyarakat	1. Dokumen. 2. Wawasan. 3. Sikap. 4. Perilaku.	1. Dokumen. 2. Lingkungan masyarakat. 3. Narasumber	1. Studi dokumentasi. 2. Observasi. 3. Wawancara.	1. Angket wawancara 2. Panduan observasi 3. Panduan wawancara

G. Pelaporan Monitoring dan Evaluasi SRG

Pelaporan monitoring dan evaluasi SRG dilakukan pada tengah dan akhir kegiatan program SRG. Lebih lanjut format pelaporan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut.

PEMANTAUAN PELAKSANAAN

SEKOLAH RESPONSIF GENDER

NO.	STANDAR	INDIKATOR	DESKRIPTOR	CAPAIAN				CATATAN
				≥75%	60-74%	50-59%	≤50%	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

Saran-saran dalam Monitoring

.....

.....

.....

Adapun pelaporan evaluasi dapat dilakukan dengan format berikut.

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan

BAB II PELAKSANAAN PROGRAM SRG

- A. Pelaksanaan Program
- B. Pencapaian Indikator Kinerja SRG

BAB III EVALUASI KETERCAPAIAN PROGRAM

- A. Hasil-hasil Kegiatan (Output dan Outcomes)
- B. Kendala Pelaksanaan Program
- C. Solusi

BAB IV REKOMENDASI

Diisi dengan saran-saran kepada pihak terkait untuk mendukung keberhasilan SRG.

BAB V PENUTUP

Diisi dengan kesimpulan atas semua SRG yang telah dilaksanakan.

Buku Panduan Sekolah Responsif Gender dapat dimanfaatkan sekolah, khususnya dalam upaya mengintegrasikan pengarusutmaan gender dalam implementasi standar nasional pendidikan. Dalam buku ini ditambahkan dua standar yang lain, yakni peserta didik sebagai salah satu subjek penting dalam penyelenggaraan sekolah dan peran serta masyarakat yang diharapkan mendukung pembangunan sekolah responsif gender.

Upaya pengarusutamaan gender pada institusi sekolah merupakan tugas dan tanggung jawab bersama untuk menuju perubahan budaya masyarakat agar hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati dengan berkeadilan dan berkesetaraan gender. Dengan demikian, setiap individu dapat berkembang kompetensi akademik, sikap, dan keterampilannya sehingga menjadi sumberdaya yang handal dan kompetitif baik nasional maupun global.

